

ABSTRAK

Tiara Novtiani Rahman, Lukman Hakim, Nursaleh Hartaman. *Implementasi Kebijakan Tata Ruang Sebagai Upaya Pengendalian Urban sprawl Di Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros.*

Pesatnya ekspansi kawasan terbangun dan alih fungsi lahan di Kecamatan Moncongloe menunjukkan bahwa perkembangan *urban sprawl* belum sepenuhnya mengkaji tingkat optimalitas implementasi kebijakan tata ruang dalam mendukung pengendalian pemanfaatan ruang. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan tata ruang sebagai upaya pengendalian *urban sprawl* di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori implementasi George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles & Huberman melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tata ruang telah berjalan secara kelembagaan dan administratif, tetapi belum optimal dalam mendukung pengendalian *urban sprawl*. Pada aspek komunikasi, transmisi kebijakan telah berlangsung melalui koordinasi lintas sektor, forum perencanaan, komunikasi berjenjang, dan mekanisme perizinan hingga menjangkau lima desa, tetapi komunikasi kepada masyarakat masih terbatas dan situasional. Pada aspek sumber daya, ketersediaan aparatur dan pembagian kewenangan belum diimbangi kecukupan kapasitas, anggaran, dan sarana pengawasan. Pada aspek disposisi, pelaksana menunjukkan sikap dan kepatuhan terhadap kebijakan, tetapi pelaksanaannya masih dipengaruhi keterbatasan sumber daya dan kapasitas pengawasan. Pada aspek struktur birokrasi, SOP dan koordinasi antarinstansi telah tersedia, tetapi kapasitas pengawasan dan penertiban lapangan masih terbatas. Dengan demikian, RTRW dan RDTR telah memberikan landasan normatif, tetapi implementasinya masih menghadapi keterbatasan kapasitas pelaksana, sumber daya, pengawasan, koordinasi, dan komunikasi publik, sehingga diperlukan penguatan kapasitas implementasi dan keterlibatan masyarakat agar kebijakan tata ruang tidak berhenti pada pemenuhan administratif, tetapi mampu mengarahkan pengendalian pemanfaatan ruang di tengah dinamika kawasan peri-urban.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Kebijakan Tata Ruang, *Urban sprawl*, Pengendalian Pemanfaatan Ruang.